

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, yang dikatakan sebagai “pemerintah” sekelompok orang atau organisasi yang diberi kekuasaan atau wewenang tertentu untuk melaksanakan kegiatan atau tugas, dalam hal ini melaksanakan wewenang yang sah serta melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan dalam berbagai keputusan¹.

Pemerintah dalam arti sempit adalah badan atau lembaga eksekutif dalam negara seperti presiden, gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan secara luas pengertian pemerintah adalah semua yang menyangkut aparatur negara, meliputi badan lembaga negara atau alat kelengkapan negara, untuk menjalankan berbagai aktivitas negara demi tercapainya tujuan negara². Bisa dikatakan bahwa pemerintah ialah orang yang diberi kuasa atau kepercayaan untuk mengayomi baik dalam lingkup luas maupun lingkup kecil yang masing-masing sudah ditetapkan sesuai dengan kekuasaan dan wewenangnya dengan tujuan untuk kebaikan masyarakatnya.

Pemerintahan adalah suatu proses atau cara pemerintah untuk menjalankan wewenangnya diberbagai bidang, contohnya ekonomi, politik, administrasi dan lain sebagainya, dalam rangka untuk mengelolah urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah semua kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang

¹ Sugiman, *Pemerintahan Desa 7* (2018).

² Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan* (Malang: UB Press, 2018), 139

dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti luas pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berdasarkan pada dasar negara, rakyat dan penduduk dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara³. Intinya, pemerintahan adalah sistem yang dibentuk pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, yang dimaksud desa ialah suatu kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten/kota, sebagaimana disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴.

Di Toraja, pemerintahan dalam lingkup desa disebut dengan Lembang. Lembang merupakan sebutan lain dari desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten Tana Toraja⁵. Dalam hal ini, desa sama saja dengan sebutan “lembang” yang ada di Tana Toraja. Lembang adalah suatu pemerintahan

³ Muhtar haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Malang: UB Press, 2015), 4

⁴ Trisusanti Lamangida dkk, “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto”, *publik Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 6*, no.1 (Juni 2017): 2

⁵ PERDA Tana Toraja No. 3 tahun 2006, pasal 1

yang dikepalai oleh kepala Lembang, yang lingkup pemerintahannya berada pada daerah.

Kepala Lembang mempunyai peran yang penting secara aktif membina dan menempatkanb aparatur lembang untuk meningkatkan produktifitas kerja baik terhadap aparatur maupun terhadap lingkungan kerja lembang tersebut. Kepala lembang merupakan komponen yang berpengaruh dalam meningkatkan produktifitas kinerja serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegitan di kantor lembang baik administrasi, pembinaan aparatur lembang dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lembang⁶. Hal tersebut menjadi penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala lembang yang mengkehendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Pemerintah lembang beserta aparatnya sebagai administator penyelenggara utama aktivitas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pembina ketentraman dan ketertiban diwilayahnya.

Kinerja sangatlah penting dalam pemerintahan, terlebih khusus dalam pemerintahan desa atau lembang. Kinerja merupakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja tidak hanya dilihat dari hasil yang dicapai tapi kepada apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan

⁶ Lamangida, Op.Cit.,

skema strategis suatu organisasi⁷. Dengan demikian, kinerja pemerintahan dipahami sebagai suatu tingkat pencapaian hasil dalam tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan sejauhmana suatu proses kegiatan dalam organisasi itu memberikan hasil dan untuk mencapai tujuan. Dan disitulah masyarakat dapat menilai kinerja yang dijalankan.

Masyarakat desa pada umumnya ingin melihat para pemimpin dan aparatur dalam lembang benar-benar menjalankan program kerja lembang yang lebih baik untuk kemajuan desa atau daerahnya. Terwujudnya Lembang yang tergolong sejahterah tentunya tidak terlepas dari siapa pemimpin Lembangnya, melalui kinerja pembangunan desa, serta hal-hal yang bisa membangun demi kebaikan lembang tersebut. Dampak dari kepemimpinan kepala lembang dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dan dikerjakan oleh pemerintah setempat sehingga masyarakat merasakan hasil kinerja dari pemerintah tersebut. pemerintah kepala lembang randanan dan jajarannya telah bekerja selama tujuh tahun. Sesuai dengan peraturan daerah, masa jabatan kepala lembang sekitar enam tahun masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan⁸.

Berdasarkan observasi awal, penulis yang dimana adalah salah satu warga di Lembang Randanan meninjau secara langsung dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Pemerintahan yang telah dijalankan kurang lebih enam tahun, tentu telah

⁷ Bastian Indra, *Akutansi Sektor Publik, Suatu Pengantar* (Jakarta : Earlangga, 2006), 267

⁸ PERDA Tana Toraja No 3, 2014, pasal 12

dirasakan dan dilihat oleh masyarakat. Dari kinerja kepala lembang, secara khusus pembangunan jalan, dapat diperkirakan bahwa pemerintahan yang sudah dijalankan sejauh ini tentu dirasakan oleh masyarakat, enam tahun itu cukuplah lama menyelenggarakan pemerintahan lembang, melaksanakan pembangunan lembang, pembinaan kemasyarakatan lembang dan pemberdayaan masyarakat lembang. Menurut salah satu warga, pemerintah sekarang kurang melihat keluhan masyarakat yang selama ini dirasakan khususnya pada pembangunan jalan dimana ada jalan yang dari dulu tidak pernah diperbaiki sampai sekarang dan jalanan itu bisa saja dapat mengakibatkan kecelakaan ketika dilalui, karena jalanan itu sudah berlubang bahkan licin apalagi kalau hujan deras⁹. Dalam peninjauan penulis ada masyarakat berpendapat bahwa jalanan itu kalau beberapa hari hujan akan tergenang air beberapa hari, dan sangat meresahkan¹⁰. Seharusnya dalam hal ini pemerintah lebih terbuka dan merata dalam pembangunan. Melihat kondisi jalanan yang merupakan akses terpenting untuk perekonomian masyarakat dan untuk akses kepentingan masyarakat lainnya.

Dari keluhan-keluhan tersebut, maka penulis ingin meneliti sejauh manakah kinerja kepala Lembang yang berada di Lembang Randanan Kecamatan Mengkendek tersebut. Maka penulis mengangkat judul penelitian ini “Analisis terhadap Kinerja Kepala Lembang di Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek Kabupaten TanaToraja”.

⁹ Wawancara dengan NN, masyarakat Lembang Randanan 15 Agustus 2021

¹⁰ Wawancara dengan NN, masyarakat Lembang Randanan 12 September 2021

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat latar belakang tersebut maka yang menjadi fokus rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana kinerja kepala lembang di Lembang Randanan Kecamatan Mengkedek Kabupaten TanaToraja?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan kepala lembang di Lembang Randanan Kecamatan Mengkedek Kabupaten TanaToraja

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun secara langsung yang terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya terhadap kinerja kepemimpinan kepala Lembang/desa.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintahan Lembang Randanan Kecamatan Mengkedek Kabupaten Tana Toraja.
- b) Dan juga sebagai bahan acuan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan terlebih manajemen kinerja dalam sebuah organisasi.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat agar dapat mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan pemerintahan kepala Lembang beserta dengan aparat lembang di Lembang Randanan Kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja